BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Masalah kriminalitas dalam kehidupan sosial tidak dapat dipungkiri, akan selalu ada dan menjadi kecemasan jangka panjang. Kejahatan juga dipandang sebagai gangguan terhadap kesejahteraan masyarakat dan lingkungannya. Kasus kriminal di Indonesia meningkat 16,16% pada pekan ke-22 tahun 2020 (Halim, 2020). Di antara catatan kepolisian dari 5 besar kasus kriminalitas yang terjadi di Indonesia, kasus dengan unsur kekerasan menempati urutan kelima dalam kategori pencurian dengan kekerasan (curas), dengan total 119 kasus (Ibrahim, 2020). Tindak pidana kekerasan adalah salah satu bentuk kejahatan yang terjadi dalam masyarakat, dan perkembangan motif, sifat, intensitas, dan modus operandinya semakin beragam.

Salah satu bentuk kejahatan kekerasan diantaranya adalah pelecehan dan eksploitasi seksual atau bisa disederhanakan dengan sebutan kejahatan seksual. Menurut survei yang diadakan oleh Lentera Sintas dan Magdalene.co yang juga bekerjasama dengan Change.org Indonesia, menunjukkan bahwa 1.636 orang dari 25 ribu responden atau lebih dari 6%, mengatakan pernah dipaksa, diintimidasi bahkan diancam melakukan hubungan seksual atau pemerkosaan (Aziz, 2016).

Korban kejahatan seksual ini tidak hanya menimpa wanita dewasa tetapi juga wanita yang tergolong di bawah umur (anak-anak) dan tidak jarang pria dewasa dan anak laki-laki pun menjadi korban kejahatan seksual tersebut. Dikutip dari portal berita Tempo.co, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat

pada 2018 sebagian besar anak laki-laki menjadi korban kekerasan seksual. Komisioner Pendidikan KPAI mengatakan kondisi ini berbeda dengan tahun lalu (2017) dimana korban didominasi oleh perempuan. Pada tahun 2018, KPAI mencatat 122 anak laki-laki dan 32 anak perempuan menjadi korban kekerasan seksual (Hilmi, 2018).

Akhir-akhir ini kasus kejahatan seksual di Indonesia menjadi sangat diperhatikan oleh semua kalangan masyarakat, terutama kaum muda yang menggunakan media sosial dan peduli atau bergerak dalam organisasi perlindungan terhadap perempuan salah satunya adalah komunitas atau gerakan *Women's March Jakarta*, ditambah lagi pemberitaan-pemberitaan di media sosial saat ini cukup cepat dan sangat mudah sampai kepada masyarakat sehingga kasus-kasus kejahatan terhadap perempuan menjadi mudah terekspos. Kemajuan dan perkembangan teknologi juga dianggap dapat memberikan kontribusi berupa dukungan masyarakat terhadap korban kejahatan seksual melalui viralnya kasus yang dibicarakan sehingga dapat dialihkan dengan memaksa pihak-pihak terkait yang ada untuk dapat mengambil tindakan (Luthfiyah, 2020).

Di Indonesia, kasus kekerasan terhadap perempuan semakin meningkat setiap tahunnya. Menurut data Catatan Tahunan Komnas Perempuan (CATAHU) 2020, terdapat 299.911 kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang tahun 2020. Dibandingkan dengan 431.471 kasus yang dilaporkan tahun lalu, jumlah ini telah turun secara signifikan. Menurut Penanggung Jawab Komnas Perempuan, penyebab penurunan jumlah kasus tersebut karena jumlah kuesioner yang dikembalikan menurun hingga 50% dari tahun sebelumnya. Padahal, Komnas

Perempuan belum menerima informasi mengenai situasi kasus kekerasan terhadap perempuan di Provinsi Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Maluku Utara (Riana, 2021).

Sementara itu dalam kehidupan nyata sebenarnya kasus kekerasan terhadap perempuan terus meningkat terlebih pada masa *pandemic* ini. Berdasarkan kutipan dari Kompas.com di Sulawesi Tenggara menurut kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak DP3A Sulteng mengatakan sejak Agustus hingga Oktober 2020, terdapat 686 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Angka ini merupakan akumulasi dari seluruh wilayah Sulawesi Tengah yang tercatat dalam sistem informasi *online* Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni-PPA).

Dari hasil survei yang diadakan oleh Lentera Sintas, Magdalene.co bekerja sama dengan Change.org Indonesia yang dipublikasikan pada bulan Juli 2016, bahwa 93% dari korban pemerkosaan memutuskan untuk tidak melaporkan kasusnya. Ada sepuluh alasan dari korban yang membuat mereka tidak ingin melaporkan kasusnya tersebut, yang paling tinggi adalah karena para korban takut disalahkan, dan diurutan selanjutnya karena takut tidak didukung keluarga, diancam/diintimidasi, bantuan hukum yang mahal, takut dinikahkan dengan pelaku, waktu kejadian saat masih kecil, takut kehilangan pekerjaan, tidak mengerti kalau terjadi pelecehan, pelaku adalah keluarga sendiri, dan yang terakhir karena menjaga perasaan keluarga atau untuk menutup aib keluarga (Aziz, 2016).

Jika dilihat dari perspektif masyarakat, ada beberapa jenis kejahatan seksual, antara lain perzinahan, homoseksual, kumpul kebo (kohabitasi), prostitusi

(pelacuran), percabulan dan pemerkosaan. Bahkan menurut Komnas Perempuan, setidaknya ada 15 perilaku yang dapat digolongkan sebagai bentuk kejahatan seksual. Namun, 15 contoh ini bukanlah frasa standar untuk perilaku kejahatan seksual. Ada beberapa contoh lain yang juga bisa dianggap sebagai kejahatan seksual dan tidak hanya dialami oleh perempuan tetapi juga anak-anak dan laki-laki (Putri, 2020). Berdasarkan bentuk kejahatan seksual yang tercantum di atas, ada beberapa yang berbentuk atau dilakukan dengan kekerasan, tetapi dilakukan atas dasar sukarela atau kesadaran penuh dari para pelakunya.

Istilah kejahatan seksual adalah perbuatan yang dapat dikategorikan ke dalam hubungan dan tingkah laku seksual yang tidak wajar, sehingga dapat menimbulkan kerugian dan akibat yang serius bagi para korban (Wahid & Irfan, 2001). Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan bahwa pelanggaran seksual dapat diartikan sebagai segala perbuatan yang dilakukan, baik itu pelecehan verbal atau penetrasi dengan menyerang seksualitas atau alat kelamin seseorang tanpa persetujuan, dan mengandung unsur paksaan atau ancaman. (WHO, 2012)

Berdasarkan kasus-kasus kekerasan atau kejahatan seksual yang terjadi disini *stereotype* yang diberikan masyarakat adalah bahwa para korban sendiri yang membuat pelaku melakukan kejahatan seksual tersebut, ditambah dengan bias gender, juga dapat dilihat dari bagaimana citra sosial perempuan sebagai objek seksual laki-laki mempengaruhi kehidupan perempuan yang sering menghadapi kekerasan, pemaksaan, dan penyiksaan fisik, psikologis dan seksual (Maryam, 2017). Namun sebenarnya terjadinya kejahatan seksual ini bisa dilihat dari latar

belakang pelakunya itu sendiri yang menyebabkan para pelaku melakukan kekerasan atau kejahatan seksual tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaku kejahatan seksual ini diantaranya faktor pendidikan, pola asuh, lingkungan, kebiasaan melihat konten-konten yang mengandung pornografi, ketergantungan terhadap narkoba dan lain sebagainya.

Menurut Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (DPPPA) Karawang, dikutip dari *website* Diskominfo Karawang, jumlah kejahatan kekerasan terhadap perempuan ataupun terhadap anak meningkat dalam kurun waktu tahun 2018 sampai 2020. Berdasarkan catatan DPPPA Karawang, kekerasan terhadap perempuan dan anak pada 2018 khususnya dalam poin kejahatan seksual menjadi yang paling banyak korban adalah terjadi pada anak dengan jumlah 12 kasus, sementara pada perempuan dewasa ada 3 kasus. Kemudian pada tahun 2019 terdapat total 88 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, dimana ada 35 kasus yang terjadi pada poin kejahatan seksual, sementara pada tahun 2020 sampai pertengahan bulan Juni dilaporkan ada 46 kasus dengan 12 kasus mengenai kejahatan seksual (Diskominfo Karawang, 2020). Sementara itu berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu petugas di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Karawang pada tahun 2021 ini terdapat 89 orang narapidana terkait kasus kejahatan seksual, diantaranya mendapatkan vonis berkisar 3 sampai dengan 20 tahun masa tahanan. Hal ini mengindikasikan bahwa angka kejahatan seksual di Karawang (masih) tergolong tinggi, oleh sebab itu perlu mendapatkan perhatian khusus untuk menanggulangi kasus kejahatan seksual tersebut.

Korban kejahatan seksual pada umumnya akan mengalami dampak yang negatif atau tidak nyaman bagi dirinya dalam kehidupan sehari-hari atau kelak pada masa depannya. Kondisi ini akan semakin diperparah jika cara pandang masyarakat terhadap korban kejahatan seksual cenderung menyudutkan dan tidak adil, yaitu dengan menempelkan stigma negatif dan menyalahkan korban serta berdampak pada konsep diri korban. Menurut Burns (dalam Mubina, 2017), mengatakan bahwa reaksi lingkungan, terutama orang-orang yang dihormati oleh individu, merupakan salah satu faktor penting yang membentuk citra diri. Respon yang diberikan kepada individu oleh lingkungan akan menentukan bentuk konsep diri yang akan berkembang dalam diri individu tersebut, baik positif maupun negatif. Kejahatan seksual yang dialami kemungkinan besar membangkitkan pikiran dan perasaan bahwa orang tersebut tidak dicintai dan tidak berharga. Khususnya pada kasus korban kejahatan seksual, jika konsep diri yang diterima secara konsisten negatif, jelas akan membuat korban terjebak dalam situasi yang tidak nyaman dan menyenangkan, bahkan dapat membuat individu tersebut menjadi korban kejahatan seksual terulang kembali (Mubina, 2017).

Selain itu, faktor yang mempengaruhi pelaku kejahatan seksual juga bersumber dari status moral individu itu sendiri. Dikatakan bahwa individu dengan nilai moral yang rendah dan kurangnya dukungan terhadap keyakinan dan nilai menjadi alasan maraknya kejahatan seksual (Widya, 2017). Menurut data Catatan Tahunan 2020, sebagian besar kasus kekerasan atau kejahatan seksual tertinggi terjadi di sektor privat. Kekerasan di ranah privat sama seperti pada tahun-tahun sebelumnya, bentuk kekerasan yang paling tinggi adalah kekerasan fisik (31%),

disusul kejahatan seksual (1.983 (30%), kekerasan psikis (28%), 1.792 (28%), dan ekonomi 680 (10%) (CATAHU, 2021). Dalam banyak kasus pelanggaran seksual, pelaku paling sering berasal dari lingkungan terdekat korban, misalnya ayah kandung, ayah tiri, paman atau pacar.

Kondisi moralitas individu juga dapat berpengaruh terhadap keberanian, rasa malu, dan rasa bersalah seseorang dalam melakukan tindak kejahatan seksual. Menurut Clemente dkk. (dalam Sarbini, Tahrir, Hambali, & Sudirman, 2019) suatu bentuk perilaku egois yang bertentangan dengan aturan kita sendiri tanpa merasa buruk disebut *moral disengagement*. Menurut Moore (2015) dalam (Sarbini, Tahrir, Hambali, & Sudirman, 2019) bahwa *moral disengagement* memiliki hubungan positif dengan ketidakjujuran, kepribadian sinis, dan *external locus*.

Menurut Bandura (2016) *moral disengagement* terjadi melalui beberapa mekanisme yaitu *moral justification*, *euphemistic labelling*, *advantageous comparison*, *displacement of responsibility*, *diffusion of responsibility disregard or distortion of consequences*, *attribution of blame*, *dehumanisation*. Mekanisme tersebut dilakukan oleh pelaku kejahatan hanya untuk menjelaskan dirinya sendiri agar perilaku amoralnya dapat diterima oleh orang lain dan diyakini bahwa pelaku kejahatan tersebut tidak dapat dipersalahkan atas pelanggaran moralnya, tanpa perlu mengubah perilaku amoralnya.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi *moral disengagement* pada para pelaku kejahatan itu sendiri menurut Bandura diantaranya adalah *moral identity*. Menurut Winterich et al. (dalam Aisiyah, 2020) identitas moral adalah individu yang memiliki karakter moral yang dimiliki secara *internal* oleh dirinya sendiri dan

individu yang mengekspresikan karakternya kepada orang lain di luar, yang ditunjukkan dengan tindakan yang dilakukan oleh individu tersebut. Di mana hal ini dilakukan untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain. Menurut Hardy dan Carlo (2011), nilai dan norma pribadi yang teridentifikasi pada individu dapat menciptakan identitas moral tertentu. Setiap individu akan meniru perilaku lingkungannya di dalam dirinya, di mana identifikasi ini akan membentuk identitas moral individu tersebut. Ketika identitas moral ini *terinternalisasi*, individu yang memiliki identitas moral yang kuat akan memiliki komitmen moral yang tinggi untuk melakukan perilaku moral (Bergman, 2004).

Ditinjau dari maknanya, identitas moral adalah cara seseorang mempersepsikan, membayangkan serta memilih perilaku yang baik dan buruk. Dalam proses implementasinya, identitas moral biasanya diekspresikan melalui perilaku seseorang. Perilaku orang bermoral, mempunyai ciri-ciri kebaikan yang sangat khas. Berbeda dengan orang lain, mereka tidak malu untuk berbuat baik (Sarman, 2008). Sebaliknya orang dengan identitas moral rendah justru melakukan hal-hal yang merugikan diri sendiri dan orang lain, tidak dapat menerima masukan, menunjukkan ketidakpedulian, dan lain sebagainya. Menurut Aquino dan Reed (2002) identitas moral secara efektif dapat berkontribusi pada pembentukan perilaku moral. Colby & Damon, 1992 (dalam Maharani & Ampuni, 2020) menyebutkan ketika moralitas digabungkan dengan identitas seseorang, maka pikiran dan perilakunya akan didasarkan pada nilai-nilai moral tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Karawang ada salah satu kasus yang pelakunya merupakan orang terdekat

korban, yakni ayahnya korban itu sendiri. Timbulnya kasus-kasus kejahatan seksual, disebabkan moral pelakunya yang sangat rendah. Kasus ini memberi kesan bahwa pelakunya adalah orang dengan identitas moral yang rendah sehingga pelaku tega melakukan perilaku terkutuk itu kepada anak perempuannya.

Selain *moral identity* faktor yang mempengaruhi *moral disengagement* adalah *Locus of Control*, menurut Robbins dan Judge (dalam Subroto, 2017) *locus of control* adalah tingkat dimana seorang individu yakin bahwa mereka adalah penentu nasib mereka sendiri. Lebih lanjut Suyonto dan Burhanudin (Subroto, 2017) menyatakan bahwa *locus of control* menunjukkan tingkat dimana individu percaya bahwa perilaku mempengaruhi apa yang terjadi pada mereka. Detert & Trevino (2008) mengungkapkan orientasi *locus of control* berkaitan dengan bagaimana individu berpikir tentang peristiwa dalam kehidupannya. Orientasi ini secara relatif disposisi stabil yang membedakan antara orang-orang yang percaya mempunyai kontrol personal yang lebih dari hasil kehidupan mereka dengan orang-orang yang percaya bahwa hasil dikontrol oleh kesempatan dan kekuatan orang lain.

Locus of control itu sendiri dibedakan menjadi dua macam, yaitu *locus of control internal* dan *locus of control external*. Menurut Findley dan Cooper (dalam Aprilia & Solicha, 2013). Orang-orang yang mencirikan pencapaian dan kegagalan mereka dengan pengaruh *internal* seperti usaha dan kemampuan dan merasa sepenuhnya bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada mereka disebut *locus of control internal*, sedangkan mereka yang mencirikan keberhasilan dan kegagalan mereka terhadap kekuatan *external* tetap berada di luar kendali mereka, seperti

kekuatan orang lain atau kondisi tertentu dan kesempatan atau keberuntungan, itu disebut locus of control *external*. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nurfauziah (2020), di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Karawang menunjukkan bahwa sebagian dari mereka mengaku seringkali tidak merasa bersalah dan malah menyalahkan korbannya, selain itu sebagian narapidana percaya bahwa mereka masuk Lapas hanya karena tindakan dari oknum-oknum tertentu. Hal ini tampaknya menunjukkan bagaimana narapidana memandang masalah dan bagaimana mereka menghadapinya, yang secara garis besar menguraikan bagaimana mereka menerapkan *locus of control*.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pengaruh *moral identity* dan *locus of control* terhadap *moral disengagement* pelaku kejahatan seksual di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Karawang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Apakah ada pengaruh *moral identity* terhadap *moral disengagement* pada pelaku kejahatan seksual di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Karawang?
2. Apakah ada pengaruh *locus of control* terhadap *moral disengagement* pada pelaku kejahatan seksual di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Karawang?
3. Apakah ada pengaruh *moral identity* dan *locus of control* terhadap *moral disengagement* pada pelaku kejahatan seksual di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Karawang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh *moral identity* terhadap *moral disengagement* pelaku kejahatan seksual Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Karawang.
2. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh *locus of control* terhadap *moral disengagement* pelaku kejahatan seksual di Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Karawang.
3. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh *moral identity* dan *locus of control* terhadap *moral disengagement* pelaku kejahatan seksual di Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Karawang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan kontribusi kepada pemikiran sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan atau referensi dalam penelitian pada bidang psikologi klinis dan forensik

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi instansi atau lembaga khususnya di lembaga pemsarakatan klas IIA Karawang dan untuk peneliti selanjutnya.